KETERSEDIAAN DAN DAYA LAYAN PRASARANA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2006-2016

SKRIPSI

untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si)

OLEH :
MELDA LATIFAH HANUM
BP/NIM 2015/15136008

Dosen Pembimbing :
Fitriana Syahar, S.Si, M.Si

PRODI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul	: Ketersediaan dan Daya Layan Prasarana di Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016
Nama	: Melda Latifah Hanum
NIM / TM	: 15136008 / 2015
Program Studi	: Geografi
Jurusan	: Geografi
Fakultas	: IlmuSosial

Padang, 13 Februari 2020

DisetujuiOleh :

Pembimbing

Fitriana Syahar, S.Si., M.Si.
NIP. 19790113 200812 2 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan Geografi

Dr. Arie Yulfa, M.Sc.
NIP. 19800618 200604 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, Tanggal kompre 12 Februari 2020 Pukul 09.00 - 11.00 WIB

KETERSEDIAAN DAN DAYA LAYAN PRASARANA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2006-2016

Nama	: Melda Latifah Hanum
TM/NIM	: 2015/15136008
Program Studi	: Geografi
Jurusan	: Geografi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 13 Februari 2020

Tim Penguji :

Nama		Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	: Febriandi, S.Pd., M.Si.	----------
Anggota Penguji	: Dr. Paus Iskarni, M.Pd.	----------

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd
NIP. 19610218 198403 2 001

UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI
Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tanggan di bawah ini :

Nama	**: Melda Latifah Hanum**
NIM/BP	**: 15136008/2015**
Program Studi	**: Geografi**
Jurusan	**: Geografi**
Fakultas	**:Ilmu Sosial**

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

"Ketersediaan dan Daya Layan Prasarana di Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dr. Arie Yulfa, M.Sc
NIP. 19800618 200604 1 003

Padang, 13 Februari 2020
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 7C7D4AHF251245505 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Melda Latifah Hanum
NIM. 15136008/2015

ABSTRAK

Melda Latifah Hanum (2020) : *Ketersediaan dan Daya Layan Prasarana di Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016*

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur variasi keruangan tingkat ketersediaan prasarana serta daya layan prasarana berdasarkan perkembangan wilayah di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Unit analisis penelitian ini adalah tingkat kecamatan dengan cakupan wilayah kajian administrasi kabupaten. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumenter. Untuk mengukur tingkat ketersediaan prasarana dan tingkat daya layan prasarana menggunakan analisis skalogram terbobot.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 1) variasi keruangan tingkat ketersediaan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto. 2) Variasi keruangan tingkat daya layan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 mengalami perubahan. Tahun 2006, yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat Tunggul. Sedangkan tahun 2016, kecamatan yang mengalami perubahan yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dan kecamatan yang tetap dalam klasifikasi tinggi tahun 2016 berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat Tunggul.

Kata Kunci : Tingkat Ketersediaan, Tingkat Daya Layan, Pertumbuhan Penduduk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahma dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***"Ketersediaan dan Daya Layan Prasarana di Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016"***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Geografi, Jurusan Geografi FIS UNP.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Fitriana Syahar, S.Si, M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan pengarahan juga bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Febriandi, S.Pd, M.Si selaku pebimbing akademik (PA) sekaligus penguji dan Dr. Paus Iskarni, M.Pd sebagai penguji yang telah memberikan motivasi, pengarahan serta bimbingan kepada penulis.
3. Dr. Arie Yulfa, M.Sc selaku ketua Jurusan Geografi FIS UNP, Sri Mariya, S.Pd, M.Pd Sekretaris Jurusan Geografi FIS UNP beserta Staf Dosen dan Karyawan Jurusan Geografi FIS UNP.
4. Dr. Siti Fatimah, M.Pd selaku dekan FIS UNP beserta Staf Karyawan yang telah mempermudah urusan penulis dalam urusan perizinan penelitian.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman, Kepala Dinas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan pengambilan data.
6. Teristimewa bagi kedua orang tua tercinta ayahanda Haliman dan ibunda Samsidar yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan dukungan serta pengorbanannya kepada penulis, serta abang Dian Pratama Putra, dan kedua adekku Nur Aisyah Jamani dan Nur Amira Jamani serta semua

keluarga penulis tanpa terkecuali yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

7. Senior-senior, sahabat seperjuangan Wiga Deswita Manik, Dewita Afriani, Laras Lonika, Nurul Maidah R Nasution, Tri Oktaviani, Recha Ardianti, Selvia Zalna dan rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang senasib dan seperjuangan.
8. Untuk teman-teman ala kadar yang senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan solusi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Kajian Teori 8
1. Fasilitas Pelayanan 8
a. Ketersediaan Pelayanan *(Service Availibility)* 8
b. Tingkat Ketersediaan Pelayanan (*Size of Availibility*) 9
c. Fungsi Pelayanan (Daya Layan) atau *Function of Availibility* 10
2. Sarana dan Prasarana 11
3. Pertumbuhan Penduduk 15
a. Kelahiran (fertilitas) 16
b. Kematian (mortalitas) 16
c. Migrasi 16
B. Penelitian Relevan 17
BAB III METODE PENELITIAN **20**
A. Jenis Penelitian 20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 20
C. Unit Analisis Penelitian 22
D. Data dan Teknik Pengumpulan Data 22
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 23
F. Teknik Analisis Data 26
G. Variabel Penelitian 28
H. Kerangka Berpikir 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 31
A. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman 31
1. Kondisi Fisik Kabupaten Pasaman 31
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016..... 32
3. Jumlah Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016 37
a. Prasarana Pendidikan..... 37
b. Prasarana Kesehatan 38
c. Prasarana Ekonomi 39
B. Hasil Analisis Data 41
1. Hasil Analisis Tingkat Ketersediaan Prasarana Ditinjau dari Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016..... 41
2. Hasil Analisis Tingkat Daya Layan Prasarana Ditinjau dari Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi di Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016..... 45
C. Pembahasan..... 50
BAB V Penutup 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN..... 65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rekapitulasi Data 23

Tabel 2. Variabel Penelitian 28

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016 33

Tabel 4. Jumlah Prasarana Pendidikan Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016 37

Tabel 5. Jumlah Prasarana Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016 38

Tabel 6. Jumlah Prasarana Ekonomi Kabupaten Pasaman Tahun 2006-2016 40

Tabel 7. Tingkat Ketersediaan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2006. 42

Tabel 8. Tingkat Ketersediaan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2016. 43

Tabel 9. Tingkat Daya Layan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2006 .. 45

Tabel 10. Tingkat Daya Layan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2016 .. 48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Pasaman 21

Gambar 2. Kerangka Berpikir..... 30

Gambar 3. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2006..... 35

Gambar 4. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2016..... 36

Gambar 5. Peta Tingkat Ketersediaan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2006 52

Gambar 6. Peta Tingkat Ketersediaan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2016 53

Gambar 7. Peta Tingkat Daya Layan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2006 58

Gambar 8. Peta Tingkat Daya Layan Prasarana Kabupaten Pasaman Tahun 2016 59

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan tuntutan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena penduduk makin bertambah besar jumlahnya, maka kebutuhannya pun bertambah jumlahnya, jenisnya, dan kualitasnya, seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Salah satu tujuan pokok pembangunan daerah adalah mengembangkan pembangunan wilayah-wilayah yang ada di dalamnya terutama dalam hal perkembangan antar wilayah di daerah tersebut (Adisasmita, 2010).

Demikian juga dengan pembangunan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dimana dengan adanya kelengkapan fasilitas pelayanan maka suatu daerah dapat dikatakan berkembang sehingga dalam hal ini fasilitas pelayanan sosial ekonomi merupakan fasilitas yang menjadi kebutuhan penduduk pada suatu wilayah dan dapat mendukung perkembangan wilayah. Menurut Parr (1999), perkembangan wilayah senantiasa disertai dengan perubahan struktural. Perkembangan/pertumbuhan suatu wilayah merupakan suatu proses kontinyu sebagai hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.

Perkembangan suatu wilayah/kota hendaknya diikuti oleh ketersediaan yang lengkap dan dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat, sehingga perlu dilihat ketersediaan dan pelayanan fasilitas sosial tersebut. Ketersediaan fasilitas pelayanan berbeda menurut fasilitasnya dan ini tergantung pada indikator atau standar pengukurannya baik dalam fasilitas pelayanan sosial maupun fasilitas

pelayanan ekonomi. Jika fasilitas itu tersedia dan mencukupi, maka penduduknya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Muta'ali, 2000). Dalam perkembangan suatu wilayah/kota, fasilitas memang memiliki peran penting yang dapat menunjukan apakah suatu wilayah/kota tersebut dapat dikatakan baik atau buruk dilihat dari ketersediaan fasilitasnya yang lengkap sehingga dengan demikian secara berkesinambungan pemerintah berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas yang ada, hal ini juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada pada wilayah/kota tersebut, sehingga ketersediaan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dapat dirasakan pelayananya oleh masyarakat.

Dalam mengatasi masalah yang terjadi, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas sosial ekonomi untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagai tujuan pembangunan wilayah/kota. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berdampak kepada diberikannya kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Implementasi dari kebijakan tesebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengembangkan potensi daerah dengan menyediakan fasilitas wilayah/kota.

Keadaan tersebut tidak terlepas dari pertambahan penduduk di Kabupaten Pasaman yang terus meningkat, Ini ditunjukan penduduk di Kabupaten Pasaman mengalami peningkatan sebesar 16.744 jiwa, pada tahun 2006 berjumlah 256.060 jiwa, tahun 2016 bertambah menjadi 272.804 jiwa. Sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, harus pula diikuti dengan distribusi

fasilitas pelayanan sarana dan prasarana yang merata sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Daya layan adalah kemampuan suatu fasilitas pelayanan sosial ekonomi dalam melayani kebutuhan penduduk. Mengetahui ketersediaan dan daya layan suatu fasilitas pelayanan penting dilakukan untuk memberikan gambaran realitas dan evaluasi dari suatu fasilitas sehingga dapat diperoleh penyusunan langkah-langkah prioritas dalam penyediaan fasilitas tersebut (Muta'ali, 2006).

Di Kabupaten Pasaman belum terdapat adanya keseimbangan antara ketersediaan fasilitas pelayanan sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk agar sesuai dengan kebutuhannya. Pertambahan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016, dimana pertambahan sarana dan prasarana tersebut dapat memberikan gambaran tentang perkembangan Kabupaten Pasaman. Perkembangan wilayah tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan suatu daerah, akan tetapi disisi lain adanya perkembangan wilayah harus diimbangi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Pasaman pada tahun 2006 adalah 364 unit menjadi 399 unit pada tahun 2016 yang terdiri dari pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA, namun jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Pasaman belum dapat terlayani dengan baik. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki standar 1 fasilitas TK untuk melayani 1.250 penduduk. Fasilitas SD, setiap terdapat 1.600 penduduk maka minimal didirikan 1 SD. Untuk tingkat SMP, minimal terdapat 1 fasilitas apabila untuk 4.800 penduduk. Sedangkan untuk tingkat SMA, setiap terdapat 4.800 penduduk maka minimal didirikan 1 fasilitas pendidikan setingkat SMA sederajat. Sarana pendidikan sudah

tersebar di masing-masing Kecamatan Kabupaten Pasaman, namun terdapat beberapa wilayah yang belum dapat terlayani. Sarana kesehatan pada tahun 2006 adalah 80 unit menjadi 112 unit pada tahun 2016 yang terdiri dari RS, puskesmas, puskesmas pembantu, klinik bersalin, apotek, dan toko obat. Berdasarkan standar yang ada (SNI 03-1733-2004), keberadaan 1 fasilitas rumah sakit dapat melayani sekurang-kurangnya 240.000 penduduk, fasilitas rumah sakit yang tersedia di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 ada 2 unit yang terdapat di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Panti dan jumlah penduduk keseluruhan Kabupaten Pasaman 256.060 jiwa tahun 2006 meningkat menjadi 272.806 jiwa tahun 2016, artinya pelayanan fasilitas kesehatan rumah sakit sejak tahun 2006 hingga tahun 2016 sudah terlayani, karena berdasarkan SPM yang telah ditentukan adalah satu fasilitas harus dapat melayani 240.000 penduduk. Jumlah fasilitas puskesmas di Kabupaten Pasaman tahun 2006 adalah 10 unit yang tersebar dibeberapa Kecamatan dan tahun 2016 menjadi 16 unit yang tersebar di semua Kecamatan. Fasilitas puskesmas harus ada apabila terdapat 120.000 penduduk di sekitar daerah tersebut. Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Pasaman tahun 2006 adalah 38 unit meningkat menjadi 50 unit yang tersedia di tiap Kecamatan. Sebuah fasilitas puskesmas pembantu harus tersedia apabila sudah terdapat 30.000 penduduk, fasilitas klinik bersalin hanya terdapat satu Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping tahun 2006 dan pada tahun 2016 terdapat dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Padang Gelugur, untuk fasilitas klinik bersalin minimal terdapat 1 fasilitas apabila untuk 30.000 penduduk, sedangkan fasilitas apotek dan toko obat juga merupakan

fasilitas yang penting dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan minimal terdapat 1 fasilitas untuk 30.000 penduduk. Sedangkan jumlah sarana ekonomi seperti pasar, toko/kios, dan koperasi tahun 2006 adalah 658 unit dan bertambah menjadi 792 unit tahun 2016. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 yang ditetapkan, bahwa 30.000 penduduk untuk 1 fasilitas pasar dan koperasi. Sedangkan untuk fasilitas toko/kios, ditetapkan bahwa 2.500 penduduk untuk 1 fasilitas toko/kios. Ketersediaan sarana ekonomi sudah tersebar di tiap-tiap Kecamatan Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa tingkat pelayanan prasarana di Kabupaten Pasaman belum memadai. Disamping itu, pembangunan prasarana Kabupaten Pasaman difokuskan pada wilayah yang maju saja. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap tingkat pelayanan prasarana di Kabupaten Pasaman, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya yang bisa dipastikan akan terus menerus meningkat.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **"KETERSEDIAAN DAN DAYA LAYAN PRASARANA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2006-2016"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah ketersediaan jumlah penduduk dengan prasarana yang belum seimbang seperti prasarana aksesibilitas wilayah, pendidikan, kesehatan, peribadatan, air bersih, TPS, dan perumahan, sedangkan prasarana ekonomi yang

meliputi fasilitas perdagangan dan keuangan, angkutan umum, serta fasilitas pelayanan telepon.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat ketersediaan prasarana dan tingkat daya layan prasarana ditinjau dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketersediaan prasarana ditinjau dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 ?
2. Bagaimana tingkat daya layan prasarana ditinjau dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengukur tingkat ketersediaan prasarana ditinjau dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016.
2. Mengukur tingkat daya layan prasarana ditinjau dari pendidikan kesehatan, dan ekonomi di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak antara lain:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan prasarana wilayah.
2. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains Strata Satu (S1) pada Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Fasilitas Pelayanan

Penduduk yang tinggal di suatu wilayah, dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya membutuhkan dukungan fasilitas pelayanan. Secara umum fasilitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fasilitas umum, sosial dan ekonomi. Dua fasilitas pertama sebagian besar menjadi tanggungjawab pemerintah dan umumnya tersedia di semua tempat, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan. Sedangkan fasilitas ketiga umumnya menganut kebutuhan pasar dan tidak disetiap tempat tersedia (Muta'ali 2015:193).

Ketersediaan fasilitas pelayanan turut berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah. Evaluasi fasilitas terhadap hirarkhi pelayanan merupakan bagian dari analisis regional, khususnya yang menyangkut tentang sentralitas regional. Dalam menilai ketersediaan fasilitas pelayanan terdapat 3 metode (Muta'ali, 2015) yaitu :

a. Ketersediaan pelayanan *(service availibility)*

Ketersediaan pelayanan *(service availibility)* adalah mengukur ada atau tidaknya suatu fasilitas pelayanan. Ketersediaan fasilitas pelayanan dapat menjadi salah satu parameter pembangunan wilayah. Semakin banyak fasilitas pelayanan yang tersedia dalam suatu wilayah, maka semakin berkembang wilayah tersebut. Karena untuk membangun sebuah fasilitas pelayanan, suatu wilayah harus mampu

memenuhi Threshold (Population Threshold) adalah jumlah penduduk minimal yang diperlukan untuk mendirikan suatu fasilitas pelayanan agar dapat beroperasi secara menguntungkan dan efisienadalah jumlah penduduk minimal yang diperlukan untuk mendirikan suatu fasilitas pelayanan agar dapat beroperasi secara menguntungkan dan efisien) yang dibutuhkan sehingga dapat tercapai optimalisasi daya layan fasilitas pelayanan terhadap penduduk.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur ketersediaan prasarana tidak menggunakan metode Skala Guttman tetapi metode yang digunakan adalah metode skalogram terbobot. Pembobotan adalah bobot yang diberikan pada masing-masing fasilitas pelayanan berdasarkan tingkatan fungsi pelayanannya. Pengelompokan tanpa menggunakan pembobotan artinya menganggap semua indikator mempunyai dan mendapatkan prioritas yang sama. Ini tampaknya tidak mungkin dilaksankan dalam proses pembangunan. Keterbatasan dana, ketersediaan waktu dan kesempatan, keberadaan alat dan tenaga memaksa untuk memberikan prioritas pembangunan.

b. Tingkat Ketersediaan Pelayanan (size of availibility)

Tingkat ketersediaan *(size of availibility)* adalah suatu ukuran atau level yang dilihat dari prasarana pelayanan yang tersedian (Muta'ali, 2015). Tingkat ketersediaan pelayanan diukur dengan jumlah unit pelayanan yang tersedia yang sudah diberikan bobotnya pada masing-masing fasilitas pelayanan. Jumlah pelayanan merupakan informasi penting dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan dan alokasi ruang atau wilayah yang membutuhkan. Jumlah fasilitas

pelayanan mengikuti keberadaan penduduk yang dilayani, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk maka jumlah pelayanan semakin banyak. Selain itu dapat ditunjukkan distribusi fasilitas antar wilayah dan konsentrasi fasilitas.

Metode untuk mengetahui tingkat ketersediaan pelayanan salah satunya adalah dapat dilakukan dengan menggunakan metode skalogram terbobot. Metode skalogram terbobot adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan. Dalam metode ini digunakan bobot pada masing-masing fasilitas. Bobot merupakan kriteria minimum untuk mendapatkan hasil penilaian pada masing-masing unit fasilitas. Semakin tinggi fungsi pelayanan fasilitas, maka bobotnya semakin besar. Metode ini juga memberikan hirarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling banyak sampai paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangan. Jumlah ketersediaan sarana prasarana lebih berarti jika dilakukan pembobotan fasilitas dan membandingkannya dengan luas wilayah/jumlah penduduk sehingga diperoleh daya layannya.

c. Fungsi pelayananan (Daya Layan) atau *Function of Availibility*

Daya layan merupakan perbandingan antara jumlah ketersediaan antara jumlah ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding, seperti besarnya pengguna aktual, pengguna potensial, penduduk keseluruhan, luas wilayah, dan dengan pembanding standar. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat

ketercukupan sebuah fasilitas pelayanan dalam melayani jumlah penduduk tertentu.

Fungsi daya layan memberikan indikasi kualitas dan tingkat ketercukupan pelayanan, sehingga semakin baik daya layan, kualitas fasilitas juga semakin baik. Sedangkan jika memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertentu, maka kondisi daya layan lebih baik jika nilainya melebihi standar yang ditetapkan (Muta'ali 2015:195).

Ketersediaan fasilitas pelayanan dapat menjadi salah satu parameter pembangunan wilayah. Semakin banyak fasilitas pelayanan yang tersedia dalam suatu wilayah, maka semakin berkembang wilayah tersebut. Karena untuk membangun sebuah fasilitas pelayanan, suatu wilayah harus mampu memenuhi Threshold (Population Threshold) adalah jumlah penduduk minimal yang diperlukan untuk mendirikan suatu fasilitas pelayanan agar dapat beroperasi secara menguntungkan dan efisienadalah jumlah penduduk minimal yang diperlukan untuk mendirikan suatu fasilitas pelayanan agar dapat beroperasi secara menguntungkan dan efisien) yang dibutuhkan sehingga dapat tercapai optimalisasi daya layan fasilitas pelayanan terhadap penduduk.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan alat pembantu dalam prasarana itu, sarana dan prasarana merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jayadinata (1999:37) dalam tesis yang disusun oleh Heri Kuntadi tahun 2005 menyebutkan bahwa: "Sarana dan prasarana dapat diartikan juga sebagai fasilitas (upakarya),

pengertian fasilitas adalah lebih luas dari pengertian prasarana karena meliputi sarana yaitu alat-alat yang digunakan dalam prasarana tersebut".

Prasarana atau infrastruktur menurut Jayadinata (1999:31) adalah "Alat yang paling utama dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi". Sejalan dengan pendapat Jayadinata di atas yang dimaksud dengan prasarana dalam buku yang dikarang oleh Bakaruddin (2011;90-91) menyatakan bahwa prasarana adalah: "Semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sehingga dapat memudahkan untuk memenuhi kebutuhan selama mereka melakukan perjalanan".

Huisman (1997) mengungkapkan bahwa pengagihan pelayanan merupakan salah satu kebijaksanaan pembangunan keruangan untuk meningkatkan pertumbuhan pusat-pusat pelayanan yang dapat menghubungkan pusat kota dengan *hinterland*nya. Dalam rangka meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, fasilitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan tidak dapat berjalan lancar apabila prasarana kurang memadai. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor yang potensial dalam menentukan masa depan perkembangan suatu wilayah perkotaan dan pedesaan.

Bentuk prasaran menurut Jayadinata (1999:31) dibagi ke dalam dua kelompok yaitu :

a. Berbentuk Ruang atau Bangunan

Prasarana berbentuk ruang atau bangunan dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu:

1) Ruang tertutup, terdiri dari:
   a) Perlindungan, yaitu rumah
   b) Pelayanan umum, yaitu prasarana kesehatan dan keamanan
   c) Kehidupan ekonomi, seperti: ios pasar, bangunan bank, bangunan took, pabrik dan sebagainya
   d) Kebudayaan pada umumnya, seperti: bangunan pemerintah, bangunan sekolah, bioskop, museum, gedung perpustakaan
2) Ruang terbuka, terdiri dari:
   a) Kebudayaan, meliputi: lapangan olahraga, kolam renang terbuka, taman
   b) Kehidupan ekonomi (mata pencaharian), misalnya: sawah, kebun, kolam, hutan, pasar, pelabuhan
   c) Kehidupan sosial, misalnya: rumah sakit, kawasan perumnas, tanah lapang untuk latihan militer, danau untuk rekreasi berperahu

b. Berbentuk Jaringan

Prasaran berbentuk jaringan dibagi menjadi empat macam yakni:

1) Sistem perangkutan, misalnya: jaringan jalan, jaringan rel kereta api, jaringan sungai dan sebagainya
2) Utilitas umum, misalnya: jaringan pipa air minum, jaringan pipa gas, jaringan kawat listrik
3) Sistem komunikasi perseorangan dan komunikasi massa, misalnya: jaringan kawat telepon, jaringan telegram

4) Sistem pelayanan dalam kehidupan sosial ekonomi, misalnya: irigasi dan pengairan, parit pelayaran

Sejalan dengan pendapat Jayadinata (1999:31) di atas, Grigg dan Fontane dalam tesis yang disusun oleh Heri Kuntadi tahun (2005) mengelompokkan prasarana atau infrastruktur sebagai berikut :

a. Grup transportasi (jalan, jalan raya, jembatan)
b. Grup pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan)
c. Grup komunikasi
d. Grup keairan (air, air buangan, sistem keairan)
e. Grup pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat)
f. Grup bangunan
g. Grup distribusi dan produksi energy

Sesuai dengan pendapat para ahli di atas tentang bentuk prasarana, Lohar A.Kreck dalam Yoeti Oka (1983;172-175) membagi prasarana dalam dua bagian yaitu prasarana perekonomian dan prasarana sosial.

a. Prasaran perekonomian *(economic infrastruktur)* yang meliputi:
   1) Transportasi, yaitu pengengkutan yang dapat membawa orang/barang dari tempat tinggal menuju daerah lain atau tenpat tujuan. Hal ini dapat dilakukan melalui udara, darat, laut.
   2) Prasarana komunkasi, meliputi: telepon, telegraf, radio, TV, surat kabar, handphone, pos, dan lainnya.

3) Utilities, yaitu penerangan listrik, persediaan air minum, sistem irigasi, dan sumber energi.

b. Prasarana sosial *(social infrastruktur)* adalah semua faktor yang menunjang kemajuan atau menjamin kelagsungan prasarana perekonomian. Hal yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

1) Sistem pendidikan
2) Pelayanan kesehatan
3) Keamanan

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Prediksi jumlah penduduk yang akan datang dapat bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan dasar penduduk, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang pemenuhan kebutuhan akan lahan misalnya penggunaan lahan (BPS Indonesia, 2000).

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian dan migrasi. Penduduk akan bertambah jumlahnya kalau ada bayi la hir dan penduduk yang datang dan penduduk akan berkurang jumlahnya kalau ada penduduk yang mati dan meninggalkan wilayah tersebut (Mantra, 2009). Ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk diantaranya :

a. Kelahiran (fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas adalah tindakan reproduksi yang menghasilkan kelahiran hidup (Mantra, 2009), sehingga menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut sebagai lahir mati (*still birth*) yang tidak dianggap sebagai peristiwa kelahiran.

b. Kematian (mortalitas)

Menurut Budi Utomo (1985) dalam Mantra (2009) yang dimaksud dengan mati adalah peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas (kematian) penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

c. Migrasi

Secara sederhana migrasi didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Sedangkan secara formal, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politi/Negara ataupun batas administrasi/batas bagian suatu Negara. Bila melampaui batas Negara maka disebut dengan migrasi internasional (migrasi internasional). Sedangka migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu Negara, baik antar daerah ataupun antar Provinsi, seperti urbanisasi dan transmigrasi. Pindahnya penduduk ke suatu

daerah tujuan disebut dengan migrasi masuk. Sedangkan perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal disebut dengan migrasi keluar (BPS, 2005).

Pertambahan penduduk yang cepat akan mempengaruhi tinggi kepadatan penduduk disuatu wilayah atau daerah tertentu. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat sedangkan kapasitas ruang atau wilayahnya bersifat tetap atau tidak mengalami perluasan. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan penyebaran penduduk yang merata maka akan terjadi suatu ledakan penduduk di suatu daerah tertentu, terutama pada daerah yang mempunyai daya tarik yang cukup kuat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosialnya, hal ini dikarenakan manusia cenderung mencari tempat yang mempunyai sumber penghidupan yang tinggi (Mantra, 2009).

B. Penelitian Relevan

Penelitian terkait tingkat ketersediaan sarana dan prasarana sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian tersebutlah yang menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian tentang ketersediaan sarana dan prasarana. Berikut ini dikemukakan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian pertama dilakukan oleh Nur Faizin (2010) yang dilakukan di Kecamatan Kebakkramat dengan judul “Analisis Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kecamatan Kebakkramat Tahun 1998 dan Tahun 2007”. Dengan tujuan peneltian: Pertama, mengetahui potensi sumber daya wilayah pada setiap desa di Kecamatan Kebakkramat. Kedua, mengetahui

ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi di Kecamatan Kebakramat. Ketiga, mengetahui tingkat daya layan sarana dan prasarana sosial ekonomi secara keruangan di Kecamatan Kebakkramat. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis data sekunder dan observasi. Hasil dari penelitian yaitu: 1) rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi antar wilayah desa menurut potensi wilayahnya, 2) di daerah penelitian terdapat perbedaan potensi sumber daya wilayah antar lokasi wilayah-wilayah desa, 3) besar potensi sumber daya wilayah tidak mempengaruhi besar tingkat daya layan dari sarana dan prasarana sosial ekonomi atas dasar agihan keruangan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Junianto yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dengan judul "Analisis Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan) di Kecamatan Batang kuis, mengetahui Ketersediaan pelayanan ekonomi (fasilitas pasar, toko, kios atau warung, reprasi sepeda motor dan fasilitas bank) di Kecamatan batang Kuis. Dari analisis ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi didapatkan bahwa: 1) Ketersediaan fasilitas pelayanan sosial di Kecamatan Batang Kuis ditinjau dari fasilitas pelayanan pendidikan (SD, SLTP dan SLTA) belum dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang seharusnya ketersediaan fasilitas SD memiliki 27 unit gedung sekolah, 162 ruang, fasilitas SLTP 14 unit gedung sekolah dan 24 ruang serta fasilitas SLTA 11 unit gedung sekolah dan 66 ruang. Selain itu fasilitas kesehatan belum dapat melayani seluruh penduduk seharusnya

ketersediaan puskesmas 2 unit, puskesmas pembantu 10 unit, praktek dokter 12 unit dan fasilitas balai pengobatan sebanyak 20 unit. 2) Ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi (pasar, kios, dan reperasi sepeda motor) belum dapat melayani semua penduduk yang seharusnya ada 2 ketersediaan fasilitas pasar, fasilitas kios atau warung sebanyak 236 unit. Berbeda dengan fasilitas toko dan bank sudah dapat melayani seluruh penduduk Kecamatan Batang Kuis sehingga sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Evita Rahmawati yang dilakukan di Kabupaten Sragen dengan judul "Evaluasi Hirarkhi Pusat-Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 2001". Tujuan penelitian ini yakni: Pertama, mengetahui potensi fisik dan sosial ekonomi wilayah di Kabupaten Sragen. Kedua, mengetahui kondisi daya layan dan kebutuhan fasilitas pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sragen. Ketiga, menentukan arah dan pengembangan hirarkhi pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data skunder, yaitu mengolah data yang telah tersedia. Hasil analisis menunjukkan bahwa arahan penentuan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi berdasarkan pada potensi wilayah, kondisi daya layan dan kebutuhan pelayanan fasilitas sosial ekonomi dan kepadatan penduduk.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variasi keruangan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Dua Koto.
2. Variasi keruangan tingkat daya layan sarana dan prasarana di Kabupaten Pasaman tahun 2006-2016 mengalami perubahan. Tahun 2006, yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat Tunggul. Sedangkan tahun 2016, kecamatan yang mengalami perubahan yang termasuk dalam klasifikasi tinggi berada di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan dan kecamatan yang tetap dalam klasifikasi tinggi tahun 2016 berada di Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Padang Gelugur, dan Kecamatan Mapat Tunggul.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam memperhatikan tingkat ketersediaan dan daya layan prasarana di Kabupaten Pasaman. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan ketersediaan

prasarana. Pemerintah diharapkan melakukan pembangunan prasana sesuai dengan kebutuhan penduduknya.

2. Perlu dilakukan pemerataan pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasaman agar semua wilayah dapat berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A, Yoeti, Oka. 1983. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa

Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta: Jakarta.

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2008. Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2007. Kabupaten Pasaman dalam Angka 2007, Kabupaten Pasaman.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, 2017. Kabupaten Pasaman dalam Angka 2017,Kabupaten Pasaman.

Bakaruddin. 2009. Perkembangan dan Permasalahan Kepariwisataan. Padang: UNP Press.

Budiharjo, Eko. 1995. Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: UGM

Burhanuddin, Abdullah. Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jakarta: LP3ES, 2006.

Evita Rahmawati, 2001. Evaluasi Hirarkhi Pusat-Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi di Kabupaten Sragen Tahun 200. Skripsi. Surakarta : Fakultas Geografi UMS.

Hermaputra, Y. 2003. Evaluasi Fasilitas Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Boyolali, Skripsi : Surakarta Fakultas Geografi UMS.

Huisman H. 1997. Perencanaan Pelayanan dan Pusat Pelayanan, Faculty of Geography Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Jayadinata, T. Johara, 1999. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung : ITB.

Junaedi, H. 1999. Pembangunan di Pedesaan.Jakarta: UI Press.

Junianto, 2014. Analisis Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Jurnal. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

Mantra Bagoes, Ida. 2009. Demografi Umum. Surakarta: Pustaka Pelajar

Mulyadi, 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba. Empat. Jakarta

Mulyadi, 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba. Empa. Jakarta

Muta'ali, Lutfi. 2015. Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi

Muta‟ali, Luthfi. 2000. Teknik Analisis Regional. Jogyakarta :Jurusan PPW Fakultas Geografi UGM.

Nur Faizin, 2010. Analisis Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kecamatan Kebakkeramat Tahun 1998-2007. Skripsi. Surakarta : Jurusan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pabundu Tika, Moh. 1997. Metode Penelitian Geografi. Jakarta: PT Gramedia

Rondinelli, Dennis A, 1985. Applied Methods of Regional Analysis, The Spasial Dimentions of Development Policy. London : West New Pree.

Rustiadi, Ernan dkk. 2011. Perncanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, Metode Penelitian Survei (Editor), LP3ES, Jakarta

Standar Pelayanan Minimum (SPM) SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan. Sarana Pendidikan: Badan Standar Nasional Indonesia

Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA

Wijaya, Haw. 1998. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Jakarta : Raja Grafindo Persada.